

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak Indonesia melaksanakan otonomi daerah yaitu pada 1 Januari 2001 yang mana pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri mensyaratkan adanya suatu perimbangan daerah. Otonomi daerah ini merupakan sistem pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Otonomi daerah ini mencakup pendistribusian keuangan antar daerah dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah itu sendiri. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu agar pemerintah daerah mampu untuk mengatur keuangan daerah dengan tetap berpegangan pada prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan dilaksanakan otonomi daerah juga pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam menentukan setiap kegiatannya tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan pemerintah daerah mampu untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya, dengan mengenali potensi-potensi dari daerahnya maka pemerintah daerah akan mampu untuk merealisasikannya secara efektif dan efisien. Pada pelaksanaan otonomi daerah, peran dari pada pemerintah sangat penting dalam pengaturan perekonomian yang modern. Dalam hal ini pemerintah memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perekonomian dan melaksanakan kegiatan perekonomian yang tidak bisa dilakukan oleh unit lainnya.

Di Indonesia yang mana masih termasuk dalam kategori Negara Berkembang, campur tangan pemerintah di dalam perekonomian di Indonesia cukup besar. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam perekonomian juga relatif besar. Pada era otonomi daerah, termasuk di dalamnya desentralisasi fiskal diharapkan untuk tersajinya peningkatan pada sektor publik. Dengan terjadinya peningkatan pada pelayanan publik ini, yang mana akan menarik perhatian dari pada investor untuk membuka usaha di daerah.

Peningkatan pada pelayanan publik ini tidak lepas dari pengalokasian dari rancangan APBD daerah itu sendiri, yang mana dalam hal ini termasuk pada pengalokasian anggaran belanja modal. Pengalokasian anggaran belanja modal ini termasuk pengalokasian yang paling kecil dibandingkan pengalokasian untuk belanja yang lain. Pengalokasian anggaran belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang termasuk kelancaran pelaksanaan dari tugas pemerintah maupun untuk kepentingan dari fasilitas publik. Anggaran belanja modal juga dipengaruhi oleh jumlah dari pendapatan daerah, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana perimbangan yang salah satunya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini merupakan sumber dana yang utama, pada praktiknya ini digunakan untuk melakukan pembiayaan atas aktivitas operasi dan belanja yang lain yang termasuk di

dalamnya belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dilaporkan dalam APBD. Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan dari pemerintah pusat yang menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen di dalam Dana Perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas formula dengan konsep kesenjangan Fiskal (Fiscal Gap). Dengan kata lain, tujuan pentingnya alokasi Dana Alokasi Umum adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia. Dana Alokasi Umum dalam hal ini digunakan salah satunya melakukan belanja modal. Menurut Kuncoro (2004) Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus, kebutuhan khusus dalam Dana Alokasi Khusus yang mana kebutuhan khusus itu meliputi (1) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain, (2) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigran, (3) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai, (4) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian suatu daerah, karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Mudrajat Kuncoro, 2004). Kenyataan yang tersaji dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah Belanja Modal dibandingkan dengan jumlah Belanja Pegawai.

Berdasarkan undang-undang No 32 Tahun 2004 salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA WILAYAH JAWA TENGAH TAHUN (2016-2018)”).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah?

### **C. Tujuan**

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Menambahkan khasanah dunia pustaka pembaca.
  - b. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu akuntansi sektor publik, sehingga dapat mengetahui pentingnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi kantor pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembelanjaan modal.
  - b. Dapat dimanfaatkan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu untuk kemajuan pemerintah daerah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika penulisan yang baik, teratur, dan terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, mencatumkan secara urut dari bab ke bab. Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian, yang meliputi urian latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan definisi otonomi daerah, PAD, DAU, belanja modal, tinjauan dari penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan perumusan hipotesis penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel, data dan sumber data, variabel dan pengukurannya, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

## **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan analisis data, temuan empiris yang diperoleh penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan analisis data.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan berguna dan relevan bagi penelitian selanjutnya.